

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islamophobia merupakan ketakutan dan permusuhan yang ekstrim terhadap Islam dan umat Islam yang sering berujung pada ujaran kebencian, kejahatan rasial, serta diskriminasi sosial dan politik. Hal ini dapat digunakan untuk merasionalisasi kebijakan seperti pengawasan massal, penahanan, dan pencabutan hak pilih, dan dapat mempengaruhi kebijakan dalam maupun luar negeri. Islamophobia sendiri telah hadir dalam wacana Barat sejak Abad Pertengahan, yang mana stereotip negatif terhadap Muslim membantu dukungan masyarakat terhadap Perang Salib. Penggambaran umat Islam sebagai orang yang tidak beradab dan penuh dengan kekerasan juga membantu merasionalisasikan dominasi kolonial Eropa di sebagian besar dunia yang mayoritas penduduknya yaitu Muslim. Menggunakan istilah “Orientalisme” untuk menggambarkan pola stereotip negative terhadap Muslim dan Masyarakat terjajah lainnya.

Cakupan dan definisi yang tepat dari istilah islamophobia, termasuk hubungannya dengan ras, telah menjadi bahan perdebatan. Sejumlah ulama menganggapnya sebagai bentuk xenophobia atau rasisme, sementara pendapat yang lain membantah adanya hubungan diantaranya terutama dengan basis bahwa agama tidaklah sama dengan ras. Penyebab dari Islamophobia juga menjadi topik perdebatan, terutama diantara para komentator yang mengajukan argumennya masing-masing. Beberapa penyebab yang diutarakan adalah serangan 11

september, kebangkitan kelompok militan seperti ISIS, serangan terror di berbagai tempat, meningkatnya penduduk muslim di Eropa dan Amerika Serikat karena pemerintah mereka menerima pengungsi-pengungsi dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Afrika, pemaksaan penerapan hukum islam, dan lain-lain. Istilah ‘Islamphobia’ dipopulerkan dalam laporan tahun 1997 oleh Runnymede Trust, sebuah lembaga pemikir Inggris yang menangani rasisme dan prasangka etnis. Islamophobia di Amerika Serikat telah menjadi isu yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Ini mencakup sifat negatif, prasangka, dan diskriminasi terhadap orang-orang Muslim atau orang-orang yang dianggap terkait dengan Islam. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap Islamophobia di Amerika Serikat termasuk peristiwa serangan 11 September 2001, retorika politik yang mempertajam perbedaan antara Barat dan Muslim, serta penyebaran informasi yang salah tentang Islam dan Muslim.

Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai bentuk, termasuk serangan verbal, fisik, dan diskriminasi dalam lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Banyak kelompok advokasi dan individu telah bekerja untuk mengatasi Islamophobia melalui pendidikan, dialog antaragama, advokasi kebijakan, dan upaya lainnya. Meskipun demikian, Islamophobia tetap menjadi masalah yang relevan dan kompleks di Amerika Serikat.

Saat ini Islamphobia tak hanya bertahan, tapi cenderung meningkat di Amerika Serikat sejak awal millenium baru yang terus berlanjut, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Survei yang diselenggarakan oleh Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) Washington D.C. yang dimana di

dalam survei berjudul *American Muslim Poll 2018: Pride and Prajudice-Featuring the First-Ever National American Islamphobia Index*, ISPU memberikan sejumlah hasil dari survei yang mencerminkan dari gejala Islamphobia yang terjadi di Amerika Serikat. Pada era presiden Obama, hubungan Amerika dengan Negara-negara Muslim terbilang baik. Peran Obama sebagai pemimpin negara menunjukkan sikap yang terbuka terhadap Islam bahkan membuat pandangan baru untuk mengajak seluruh warga Amerika untuk saling bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Ia juga menentang keras aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Hal ini tentu didasari alasan oleh fenomena yang sudah terjadi pada aksi terror pada kejadian 11 September 2001.

Hal ini yang menjadikan alasan Donald Trump membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tidak hanya menjadi hal baru lagi pada saat itu terjadinya konflik antara umat Muslim di Amerika Serikat yang meningkat pesat. Terlebih dengan dipilihnya Donald Trump sebagai presiden AS, ujaran kebencian kepada umat Muslim di AS meningkat. Masyarakat Amerika bahkan dunia terus ditekankan akan slogan "*Make America Great Again*", dengan maksud lain fokus utama kebijakan luar negerinya adalah mengenai urusan domestik. Dapat diperhatikan dari slogannya yang semakin jelas mengarah kepada diskriminasi.

Sesaat Donald Trump menjadi presiden, pengambilan keputusan yang diambil juga semakin memperlihatkan keseriusan dalam menangani masalah Islamophobia di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengekspresikan kebenciannya terhadap Islam dan mungkin bisa jadi kepada seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Pandangan negatif terhadap Islam/Islamophobia bukan hanya sekedar isu

saja, melainkan hal ini benar adanya dimana terlihat jelas dari pidato-pidato tentang Islam yang di keluarkan oleh Donald Trump.

Relatif tingginya Islamophobia terkait erat dengan kalangan warga Amerika yang mendukung persepsi stereotipikal yang berkembang di kalangan masyarakat Amerika sendiri yakni bahwa kaum Muslim gemar mempraktikkan kekerasan atau bahwa kaum Muslim memperlihatkan gejala dehumanisasi (atau kurang *civilized*) atau bahwa kaum Muslimin secara keseluruhan bertanggung jawab atas kekerasan individu Muslim di Amerika. Semua presepsi stereotipikal ini selanjutnya menjadi sebuah dasar bagi tindakan atau sebuah kebijakan diskriminatif terhadap kaum Muslimin, menurut survei ISPU, 61% Muslim/Muslimah mengakui sering merasakan dan pernah mengalami diskriminasi dari kelompok warga Amerika lain atau bahkan petugas/pejabat dari pemerintah sekitar (Azra, 2019). Islamophobia dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan negara-negara Islam. Dalam beberapa kasus, Islamophobia dapat menyulitkan hubungan diplomatik dan menciptakan ketegangan antara Amerika Serikat dan negara-negara Islam. Persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim dapat menghambat dialog diplomatik dan mengurangi kepercayaan antara pemerintah.

Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan politik demokrasi yang dimana demokrasi memiliki nilai bersama yang dianut oleh seluruh umat manusia dan menjadi hak semua negara. Sistem demokrasi Amerika Serikat berasal dari praktiknya sendiri. Sistem ini unik, tidak dapat diterapkan secara universal dan jauh dari sempurna. Namun, selama bertahun-tahun, Amerika Serikat, meskipun terdapat kelemahan struktural dan praktik sistem demokrasinya yang problematis,

telah mengklaim dirinya sebagai “model demokrasi”. Mereka terus-menerus mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan mengobarkan perang dengan kedok “demokrasi”, sehingga menciptakan gejolak regional dan bencana kemanusiaan. Kehadiran Islamophobia di Amerika Serikat tidak bermakna bahwa negara tersebut tidak demokratis. Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum dan perwakilan yang bebas. Namun, dalam masyarakat demokratis pun, masih mungkin terjadi Islamophobia atau ketakutan, kebencian, atau diskriminasi terhadap Islam atau orang-orang Muslim.

Amerika lahir sebagai sebuah negara yang berdasarkan kesepakatan dari berbagai koloni untuk menciptakan sebuah perdamaian yang abadi dalam lingkup kehidupan demokrasi. Amerika dibangun didasari dengan nilai-nilai demokrasi yang dimana menjadi konstitusi negara Amerika yang dimana merupakan asas dan dasar fundamental bagi seluruh sendi kehidupan rakyat Amerika Serikat. Pengaruh pemikiran Jhon Locke dan Plato banyak memberikan inspirasi kepada para pendiri negara Amerika Serikat untuk membangun sebuah peradaban yang maju serta dipenuhi hawa kebebasan yang sebelumnya tidak pernah di temukan.

Akan tetapi asas kebebasan yang seharusnya di rasakan oleh masyarakat yang tinggal di negara yang menganut sistem politik demokrasi tidak semuanya mendapatkan kebebasan, Yang paling menonjol adalah para pembenci yang merusak masjid, orang-orang fanatik yang menargetkan dan menyerang Muslim yang terlihat, dan para pembunuh, seperti Craig Hicks, yang membunuh tiga mahasiswa Muslim Amerika. terlebih setelah Donald Trump menjabat sebagai

pemimpin negara AS. Seperti contohnya masyarakat muslim yang ada di Amerika Serikat, isu Islamophobia memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri AS untuk Iran. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang telah tegang selama beberapa dekade, dan isu-isu terkait Islamophobia telah memperburuk ketegangan tersebut. Salah satu contoh dari dampaknya adalah peningkatan ketegangan antara kedua negara setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada tahun 2015 dengan Iran dan menggantinya dengan sanksi-sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran. Langkah ini memicu respon keras. Sementara itu, retorika anti-Muslim yang muncul di AS juga memperumit hubungan dengan Iran, karena Iran sering kali di anggap sebagai salah satu pemimpin Muslim yang berlawanan dengan AS.

Alasan pertama yang menjadikan Iran sebuah kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Iran yakni geopolitik, AS masih menjadi satu-satunya negara adidaya yang mempunyai tanggung jawab global (terbatas). Untuk memainkan peran global, AS harus mampu memproyeksikan kekuatannya ke luar. kedua untuk menegaskan bahwa keringanan sanksi hanya terjadi jika syaratnya menguntungkan AS, berkaitan dengan sifat rezim Iran. Ketiga, demi kepentingannya sendiri dan sebagai pemimpin global--memiliki kepentingan nyata dalam menghentikan penyebaran senjata nuklir. Potensi destruktifnya hampir tidak perlu dijelaskan, namun kita harus mengingat secara khusus potensi Iran yang memiliki nuklir untuk berbagi teknologi tersebut dengan proksi terorisnya. Meskipun JCPOA dijual sebagai instrumen untuk mencegah Iran memperoleh bom tersebut, penjualan tersebut merupakan penipuan sejak awal. Keempat, kekuatan global Amerika

bergantung pada kerja sama dengan sekutu regional, dalam hal ini terutama Israel, Arab Saudi, dan beberapa negara kecil di Teluk. Kelima, sikap Iran yang suka berperang dapat mengganggu pelayaran di Teluk, merusak perekonomian dunia, dan juga perekonomian Amerika. Keenam, Strategi "Maximum Pressure" Pemerintahan Trump meluncurkan kampanye tekanan maksimum yang melibatkan sanksi ekonomi yang sangat ketat terhadap Iran. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk melemahkan ekonomi Iran, mengurangi kemampuan Iran untuk mendanai aktivitas militernya di kawasan, dan memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan untuk perjanjian yang lebih komprehensif (Berman, 2021).

Selama lima tahun terakhir, prioritas utama Pemerintahan Obama di Timur Tengah adalah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, yang dilakukan melalui strategi multilateral dan multilateral yang menggabungkan diplomasi, tekanan ekonomi internasional, dan tekad untuk tetap mempertahankan opsi militer di atas meja. Rencana Aksi Bersama November 2013 dalam negosiasi nuklir P5-plus-one dengan Iran hanya merupakan langkah pertama menuju solusi komprehensif jangka panjang. Kekhawatiran akan pengaruh Iran yang tidak stabil serta ketidakpastian di Timur Tengah yang lebih besar akan mengharuskan Amerika Serikat dan mitra regional memastikan untuk tetap mampu mengalahkan agresi di kawasan yang bergejolak ini. Seiring dengan diplomasi mengenai nuklir terus berlanjut, Departemen akan mempertahankan semua opsi di atas meja dan melawan ancaman lain yang ditimbulkan Iran di kawasan ini, termasuk pengembangan rudal jarak menengah dan jauh serta dukungan kepada teroris dan pemberontak (Rustama, 2018).

Amerika Serikat telah menetapkan bahwa Timur Tengah menjadi sarang teroris jihadis. Selama bertahun-tahun, masalah-masalah yang saling berkaitan antara ekspansi Iran. Amerika Serikat telah belajar bahwa baik aspirasi untuk transformasi demokratis maupun pelepasan diri tidak dapat melindungi dari masalah-masalah di kawasan ini. Didalam laporan National Security Strategy (NSS) Amerika Serikat pada tahun 2017, Donald Trump memberikan statement bahwasannya Iran menjadi sponsor utama terorisme di dunia, Iran telah memanfaatkan ketidakstabilan untuk memperluas pengaruhnya melalui mitra dan proksi, proliferasi senjata, dan pendanaan Iran terus mengembangkan rudal balistik dan kemampuan intelijen yang lebih mumpuni serta melakukan aktivitas siber yang berbahaya. Pada 2015 sengketa nuklir AS-Iran memanas setelah AS mengerahkan pasukan tempurnya ke Timur Tengah menanggapi ancaman Iran akan keluar dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) atau dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir 2015 (Trump D. J., 2017, pp. 48-50). Menurut Amerika Serikat, Iran menjadi aktor destabilisasi yang mengancam keamanan dengan menentang hukum internasional dan mengejar kemampuan yang memungkinkannya mengembangkan senjata nuklir. Bahkan ketika Iran berjanji tidak mengejar senjata nuklir, kegiatan destabilisasi Iran lainnya akan terus menjadi ancaman bagi Timur Tengah, terutama bagi keamanan sekutu dan mitra Amerika Serikat di kawasan ini dan di seluruh dunia.

Negara-negara saingan mengisi kekosongan yang diciptakan oleh keruntuhan negara dan konflik regional yang berkepanjangan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, ada peluang-peluang yang muncul untuk memajukan kepentingan

Amerika di Timur Tengah. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada awal tahun 2020 ketika AS membunuh Jendral Qassem Soleimani, komandan militer paling senior Iran dalam serangan udara di Irak. Hal ini menyebabkan ketegangan besar antara kedua negara dan meningkatkan resiko konflik militer yang lebih besar di timur tengah. Kebijakan luar negeri AS untuk Iran selama tahun 2020 mencerminkan bahwa kompleksitas hubungan kedua negara dan tantangan besar yang dihadapi oleh AS dalam menangani masalah ini. Selama beberapa generasi, konflik antara Israel dan Palestina telah dipahami sebagai penyebab utama yang menghalangi perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut (Wright, Kurtzer, Nasr, & Yahya, 2020).

Saat ini, ancaman dari organisasi teroris jihadis dan ancaman dari Iran menciptakan kesadaran bahwa Israel bukanlah penyebab masalah di kawasan ini. Negara-negara semakin menemukan kepentingan bersama dengan Israel dalam menghadapi ancaman bersama. Saat ini, Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mengkatalisasi kerja sama ekonomi dan politik yang lebih besar yang akan memperluas kemakmuran bagi mereka yang ingin bermitra dengan Amerika Serikat. Dengan merevitalisasi kemitraan dengan negara-negara yang berpikiran reformis dan mendorong kerja sama di antara para mitra di kawasan ini, Amerika Serikat dapat mendorong stabilitas dan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan kepentingan AS sendiri.

Dalam buku Quadrennial Defense Review (QDR), kepentingan politik Amerika Serikat akan memperkuat kemitraan dan membentuk kemitraan baru untuk membantu memajukan keamanan melalui stabilitas (Hagel, 2014, p. 5). Amerika

akan mendukung upaya untuk melawan ideologi kekerasan dan meningkatkan rasa hormat terhadap martabat individu, Amerika Serikat pula akan bekerja sama dengan para mitra untuk menolak program nuklir Iran. Lalu dalam hal kepentingan militer dan keamanan Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer di kawasan timur tengah untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutu dari serangan teroris dan menjaga keseimbangan kekuatan regional yang menguntungkan. Amerika Serikat akan membantu mitra mendapatkan pertahanan rudal yang dapat dioperasikan dan kemampuan lain untuk mempertahankan diri dengan lebih baik dari ancaman rudal aktif. AS akan bekerja sama dengan mitra untuk menetralkan aktivitas berbahaya Iran di kawasannya.

Pandangan negatif mengenai Islamophobia ini menjadikan mayoritas negara Eropa yang merubah kebijakan luar negeri mereka seperti contoh pada negara Prancis yang telah merancang kebijakan luar negeri seperti memperketat aturan tentang pendidikan berbasis agama, aturan dalam penggunaan busana yang tidak menunjukkan karakter keagamaan yang berbau Islam (Salsadila & Yumitro, 2022). Lalu negara Inggris, menerapkan beberapa kebijakan luar negeri dalam rangka merespon pertumbuhan muslim di Inggris, seperti pembatasan jumlah imigran, dan memulangkan para imigran muslim ke negara mereka masing-masing. Amerika Serikat pun mengeluarkan kebijakan Muslim Ban yang dimana menjadi upaya pemerintah AS untuk melindungi warga negaranya serta mencegah sedini mungkin serangan teroris yang dilakukan oleh para imigran asing yang berpotensi memberikan ancaman dalam keamanan nasional dan ketentraman warga negaranya.

Kebijakan luar negeri AS terhadap Iran sering kali disertai dengan retorika negatif, yang menggambarkan Iran sebagai ancaman bagi keamanan AS atau sekutunya. Retorika semacam itu dapat memperkuat stereotip negatif terhadap Islam secara umum, karena Iran adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai contoh pada era Presiden George W. Bush ia memasukan Iran sebagai salah satu negara poros Setan “Axis of Evil” bersama Korea Utara dan Irak pada bulan Januari 2002 dan diucapkan berulang kali dalam acara resmi kenegaraan. Sikap keras Amerika terhadap Iran mendapat respon serupa dari pemimpin spiritual Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khomeini, yang menyebut Amerika sebagai “Setan Besar” dan Israel sebagai “Setan Kecil.” Lahirnya adagium-adagium ini secara sederhana menjelaskan dinamika hubungan Amerika-Iran yang tidak pernah membaik sejak peristiwa revolusi 1979 telah menyebabkan ketegangan antara AS dan negara-negara ini dan memperkuat persepsi negatif terhadap Islam (Rofii, 2015, p. 32).

Dan pada masa pemerintahan Donald Trump, ia juga telah memberikan dukungan kuat kepada sekutu regional yang memiliki ketegangan dengan Iran, seperti Arab Saudi dan Israel. Kebijakan luar negeri AS untuk Iran di bawah pemerintahan Trump juga mencerminkan ketidaksukaan terhadap diplomasi multilateral dan preferensi untuk pendekatan yang lebih unilateral. Sebagai contoh, penarikan diri AS dari perjanjian nuklir adalah contoh penolakan terhadap diplomasi multilateral yang dianggap oleh Negara sekutu Amerika Serikat sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Iran. Salah satu tindakan paling signifikan dalam kebijakan luar negeri Trump terhadap

Iran adalah pembatalan kesepakatan nuklir yang dicapai pada tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi AS untuk keluar dari JCCPOA yakni dikarenakan perubahan pemerintahan di AS. Perjanjian itu ditandatangani ketika masih dibawah kepemimpinan Obama. Presiden Obama memang lebih mengutamakan kerjasama Internasional atau multilateral. Akan tetapi sejak awal Trump sudah mengkritisi kebijakan Obama tersebut. Trump mengatakan kebijakan ini adalah kebijakan yang buruk. Trump yakin dan pada dasarnya Trump tidak percaya dengan Iran. Trump menganggap Obama merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat dan merugikan kepentingan nasional sekutu Amerika di Timur Tengah (Haass, 2020). Langkah ini, yang didorong oleh pandangan skeptis Trump terhadap Islam dan Iran, disertai dengan retorika yang keras terhadap rezim Iran dan diperkuat oleh Islamophobia yang meluas di antara para pendukungnya.

Segalanya telah berubah di era Presiden Donald J. Trump. Trump tidak hanya secara terbuka mendukung Islamophobia di jalur kampanye, sejak menjabat ia telah mengusulkan dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang menjelek-jelekan Muslim. Trump dan para pendukungnya secara terbuka mempertanyakan kesetiaan warga Muslim-Amerika. Trump tidak menciptakannya, tetapi mengidentifikasi potensinya sebagai alat politik, menggantinya, kemudian menggunakannya sepenuhnya untuk keuntungannya. Trump mengumumkan ujaran kebencian terhadap agama Islam secara personal dalam kampanyenya dengan menyampaikan kepada seluruh rakyat Amerika agar berwaspada terhadap umat Muslim, bahkan secara langsung menegaskan untuk melarang orang yang beragama Islam untuk memasuki wilayah Amerika. Trump bersikap keras terhadap umat Muslim dan

berniat menghentikan perkembangan umat muslim di Amerika salah satunya dengan menutup masjid-masjid di Amerika (Suseno, 2016). Islamophobia yang digunakan Trump dalam kampanye menggugah para pemilih yang mengaitkan kegagalan dan ketakutan mereka dengan ancaman Islam yang membayangi, mengantarkannya ke kursi kepresidenan, dan kemudian membuka peluang bagi Mahkamah Agung untuk menguatkan larangan tersebut.

Islamophobia juga bersifat struktural, seperti yang dicontohkan oleh pemberlakuan Larangan Muslim melalui perintah eksekutif presiden. "Islamophobia struktural, dimensi kedua, adalah ketakutan dan kecurigaan umat Islam terhadap lembaga-lembaga pemerintah (seperti Mahkamah Agung) dan para aktor. Ketakutan dan kecurigaan ini dimanifestasikan dan ditegakkan melalui pemberlakuan dan kemajuan hukum, kebijakan, dan program yang dibangun di atas anggapan bahwa identitas Muslim dikaitkan dengan ancaman keamanan nasional." Asosiasi tersebut menjadi dasar dari Larangan Muslim, yang menganggap setiap imigran Muslim dari lima negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang dilarang sebagai terduga teroris.

Terakhir, dan yang paling penting, Islamophobia juga merupakan sebuah dialektika yang menghubungkan kebijakan negara dengan aktor-aktor masyarakat (swasta). "Islamophobia dialektis adalah proses di mana Islamofobia struktural membentuk, membentuk kembali, dan mendukung pandangan atau sikap tentang Islam dan subjek Muslim di dalam dan di luar perbatasan Amerika." Sulit untuk mengidentifikasi Islamophobia Amerika selama delapan tahun masa pemerintahan Obama, sebagian besar karena ia sangat pandai menyembunyikannya. Hal ini tidak

berlaku di bawah kepemimpinan Trump, yang telah membuat bagian yang berbeda dari Islamophobia Amerika menjadi sangat jelas dengan retorikanya dan mudah dideteksi melalui kebijakannya (Beydoun, 2018). Sentimen anti-Muslim yang meluas di kalangan publik Amerika dapat mempengaruhi politisi untuk mengambil sikap keras terhadap negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Iran. Hal ini dapat mendorong kebijakan yang lebih agresif atau konfrontatif demi mendapatkan dukungan politik dalam negeri. Seperti contoh Travel Ban/Muslim ban pada tahun 2017, Penolakan Pejanjian Nuklir dengan Iran pada JCPOA yang sebagian besar didorong oleh pandangan yang skeptis dan curiga terhadap Iran yang dipengaruhi oleh narasi yang menghubungkan negara Islam dengan ketidakpercayaan dan ancaman, sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik yang ketat terhadap Iran kebijakan ini dipengaruhi oleh ketakutan dan prasangka terhadap Islam yang memperkuat narasi bahwa Iran adalah ancaman yang tak terhindarkan karena ideologinya. Contoh-contoh kebijakan ini menunjukkan bagaimana prasangka dan Islamophobia dapat mempengaruhi keputusan politik dan strategi diplomatik AS terhadap Iran, sering kali dengan cara yang memperdalam ketegangan dan menghambat solusi diplomatik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai, bagaimana Islamophobia mempengaruhi kebijakan luar negeri AS kepada negara Iran pada masa kepemimpinan Donald Trump, tentunya peneliti akan membahas upaya hubungan diplomatik negara Amerika Serikat dengan negara Iran serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa bahan acuan penelitian terdahulu yang dapat di jadikan sebagai rujukan. Pertama, Penelitian yang dibuat oleh Farah Atika Herawati dari Universitas Nasional pada tahun 2023 dengan judul “ Dampak Kebijakan Luar Negeri Masa Presiden Donald Trump Atas Peningkatan Islamophobia 2016-2019” penelitian ini memiliki kesimpulan dimana meningkatnya islamophobia dimasa pemerintahan Trump 2016-2019 adalah bahwa hal itu mencerminkan kekhawatiran besar terhadap agama islam di Amerika Serikat. Kebijakan dan retrorika Trump telah memicu ketakutan dan prasangka terhadap umat muslim, dengan larangan masuk bagi warga negara dari negara mayoritas Muslim sangat serius, termasuk dikriminasi, pelecehan, dan serangan fisik. Polarisasi dalam masyarakat juga semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi islamophobia, diperlukan pendidikan dan kesadaran yang lebih luas, perlindungan hak-hak warga Muslim, serta kebijakan pemerintah yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh AS untuk negara Iran dan perubahan hubungan bilateral dengan Iran pasca islamophobia .

Kedua, penelitian yang dibuat oleh Muhammad Rafi’I Zulfajri, A. Yuli Tauvani dari STAI Ahsanta Jambi pada Januari 2021 dengan judul “Tarik Menarik Islamophobia di Amerika”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini membahas tentang naik turunnya citra Islam

yang positif di negara Amerika Serikat dikarenakan Islam yang tidak lahir di daerah Amerika Serikat. Penelitian ini berkesimpulan. Islam sebagai agama memberikan arahan kepada pemeluknya, seperti agama-agama lainnya. Anjuran Islam diyakini tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan. Islam memberikan sumber inspirasi dan etika moral untuk umatnya, sesuai dengan visi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perdamaian dalam masyarakat dapat terwujud karena adanya elemen yang memperjuangkan perdamaian dan upaya rekonsiliasi dari aktor konflik. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kondisi Islamophobia di Amerika Serikat serta pengaruhnya terhadap umat Islam disana. Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak membahas mengenai pengaruh islamophobia di Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri dan hubungan bilateral dengan negara Iran.

Ketiga, penelitian yang dibuat oleh Ai Fitri Febriani dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Juli 2022 Dengan judul “Dampak Isu Islamfobia Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Pemerintahan Donald Trump”. Penelitian ini membahas bagaimana islamophobia menjadi strategi kampanye dan menjadi suatu fenomena ketakutan irrasional terhadap Islam di Amerika Serikat. Kesimpulan penelitian ini yaitu beberapa kebijakan yang diperkenalkan oleh Donald Trump untuk melarang dan mengumpulkan data warga Muslim di Amerika Serikat yang tampaknya sangat anti-Muslim dan berdampak signifikan bagi banyak muslim di Amerika Serikat. Terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas islamophobia di negara Amerika Serikat pasca pemerintahan Donald Trump. Namun ada beberapa kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak membahas

mengenai pengaruh Islamophobia pada kebijakan luar negeri di negara Amerika Serikat untuk Iran yang berdampak dengan hubungan bilateral negara AS dengan negara Iran, serta tidak membahas mengenai upaya-upaya Amerika Serikat untuk menumpas Islamophobia.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Merisa Dwi Juanita, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Agustus 2017 dengan judul "Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* Pada Tahun 2015" penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisa eksplanatif penelitian ini membahas mengenai perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh aspek dalam negeri, ekonomi dan militer juga konteks internasional. Mengenai aspek dalam negeri perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan dari partai demokrat yang menginginkan adanya penyelesaian yang menguntungkan untuk Amerika Serikat dengan menyetujui perjanjian JCPOA Amerika Serikat mencabut sanksi-sanksi dari Iran. Namun pertentangan dari lobi yahudi yang tidak menginginkan perjanjian tersebut terjadi dikarenakan Iran akan menjadi ancaman besar apabila diijinkan mengembangkan nuklir. Penelitian ini memiliki kesamaan dimana membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat untuk Iran dan membahas mengenai hubungan kerjasama AS dengan Iran dibidang Nuklir namun penelitian ini memiliki perbedaan yang dimana peneliti lebih membahas bagaimana islamophobia dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS untuk Iran pada masa pemerintahan Donald Trump.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Ahmad Zainal Mustofa, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Januari 2023, dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat di Bawah Kepemimpinan Hassan Rouhani” penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis penelitian ini membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh Presiden Hassan Rouhani terhadap Amerika Serikat terfokus pada dua aspek yaitu, ekonomi dan nuklir. Untuk menjaga stabilitas negara, Rouhani melakukan gebrakan dengan melakukan normalisasi hubungan dan pendekatan kepada negara-negara tetangga. Kemudian untuk menjaga aspek keamanan, Rouhani membuka komunikasi dengan Presiden AS yaitu Barrack Obama. Komunikasi yang terjalin tersebut menghasilkan kesepakatan baru tentang nuklir yaitu JCPOA. Pendekatan yang dilakukan oleh Rouhani ini membuat Obama menimbang ulang terkait sikap AS terhadap Iran. Obama cenderung melepaskan sikap hard power menuju soft power. Kesepakatan tersebut sekaligus mencairkan hubungan Iran-AS. Hal ini terlihat dari lepasnya intervensi ekonomi AS terhadap Iran yang memungkinkan Iran untuk menjaga stabilitas baik dalam dan luar negeri. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai kebijakan luar negeri akan tetapi bukan berarti tidak memiliki perbedaan, perbedaannya yaitu peneliti tidak membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Iran melainkan sebaliknya peneliti membahas kebijakan Iran untuk Amerika Serikat dan peneliti juga tidak membahas mengenai pengaruh Islamophobia terhadap kebijakan luar negeri AS.

Merujuk pada situasi yang sedang terjadi, imbas dari kepemimpinan Donald Trump. Jumlah Islamphobia di Amerika Serikat meningkat kembali setelah sekian

lama mereda, dan hal ini mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Iran, dan hubungan diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang : **PENGARUH ISLAMOPHOBIA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT UNTUK IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP**

Penelitian ini tentunya didukung oleh Mata Kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, sebagai berikut :

1. Diplomasi dan Negosiasi.

Mata kuliah diplomasi dan negosiasi ini membantu peneliti memahami dasar-dasar berdiplomasi dan seni dalam bernegosiasi. Seperti jenis, peran, dan fungsi diplomasi. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membantu peneliti memahami seberapa besar diplomasi dapat terlibat dalam menghadapi urusan internasional.

2. Analisis Politik Luar Negeri

Menjelaskan bagaimana menganalisis politik luar negeri yang akhirnya berdampak kepada kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara, mengkaitkan faktor-faktor internal suatu negara dalam pemenuhan kepentingan nasional di ranah internasional, dan mengaitkan faktor-faktor eksternal dalam pemenuhan kebijakan luar negeri suatu negara.

3. Islam dalam Hubungan Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam memahami mengenai peran dan pengaruh Islam dalam Hubungan Internasional yang mengaitkan Islam dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi mekanisme, kerjasama internasional, dan kebijakan luar negeri suatu negara.

4. Hubungan Internasional di Amerika Utara

Mata kuliah Hubungan Internasional di Amerika Utara menjadi sangat penting bagi penelitian “Pengaruh Islamophobia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Iran Pada Masa Pemerintahan Donald Trump” karena lokus dari penelitian ini sendiri adalah Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Mengacu pada latar belakang yang sudah disampaikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Islamophobia memberikan pengaruh terhadap Kebijakan Luar Negeri AS untuk Iran pada masa pemerintahan Donald Trump?”.

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas tentu akan berkembang seiring dengan waktu, hubungan variabel dengan variabel lain akan berkembang dan berhubungan menjadi suatu masalah yang akan diteliti. Maka, identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor sejarah, politik, dan sosial yang menyebabkan munculnya Islamophobia di Amerika Serikat, dan bagaimana Islamophobia tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Amerika?
2. Bagaimana Islamophobia di Amerika Serikat dapat merubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan negara Iran?
3. Apa saja perubahan yang terdapat dalam hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Iran pasca sebelum dan sesudah terjadinya Islamophobia di Amerika Serikat ?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan pembatasan masalah untuk menetapkan parameter dan batasan pada topik yang akan dibahas sehingga pembahasan tetap jelas, tepat, konsisten, dan terstruktur dengan baik. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tahun (2017-2021) yang dimana pada tahun 2017 Donald Trump terpilih menjadi Presiden dan pada tahun 2018 Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump menyatakan keluar dari perjanjian JCPOA. Dimana fokus penelitian ini dititik beratkan pada perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Iran pada saat pemerintahan Donald Trump dan Islamophobia memberikan pengaruh dalam perubahan tersebut.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian pada penelitian Islamophobia di Amerika Serikat sebagai berikut:

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena Islamophobia yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, khususnya kebijakan luar negeri AS untuk Iran.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor sejarah, politik, dan budaya lebih dalam tentang bagaimana Islamophobia muncul di Amerika Serikat dan mengetahui cerminan kehidupan masyarakat Amerika Serikat pada Islamophobia.
2. Untuk memahami bagaimana Islamophobia di Amerika Serikat dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri terhadap negara Iran.
3. Untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam hubungan bilateral antara Amerika Serikat untuk Iran setelah periode meningkatnya Islamophobia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca agar memahami bahwasannya Islamophobia di Amerika Serikat memiliki pengaruh penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara Iran dan

memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi suatu kepentingan negara di kancah internasional.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk penyelesaian tugas akhir untuk kelulusan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah. Mengetahui perspektif, Negara Amerika Serikat mengenai Islamphobia yang berdampak pada hubungan diplomatik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam pemenuhan kepentingan nasional.

2. Bagi Program Studi

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional lain agar bisa memahami dan mempermudah penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Islamophobia pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Hasil dari penulisan penelitian ini mampu dijadikan bahan pustaka bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam meningkatkan Pendidikan Strata 1.